

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Kemenko Polhukam RI, merupakan lembaga yang tidak kalah penting yang harus memiliki citra yang baik, dalam hal ini peran humas lembaga sangat penting untuk menggiring opini publik yang baik bagi Kemenko Polhukam RI, dalam menjalankan perannya kegiatan yang biasanya dilakukan oleh humas berkaitan dengan menjalin hubungan baik antara lembaga, organisasi atau perusahaan dengan publiknya, begitu juga dengan humas lembaga pemerintah salah satunya adalah Kemenko Polhukam RI. Humas Kemenko Polhukam RI menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, kegiatan yang seringkali dilakukan oleh humas adalah memberikan pelayanan informasi kepada publik, dimana humas lembaga pemerintah merupakan perpanjangan tangan antara lembaga pemerintah dengan publik atau masyarakat, tujuan dilakukannya pelayanan informasi oleh humas salah satunya untuk menggiring opini publik yang baik terhadap Kemenko Polhukam RI, jadi penting bagi humas dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

“...wajib untuk kita informasikan kepada masyarakat, terutama untuk informasi keterbukaan informasi publik, jadi kita wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu wajib untuk menginformasikan setiap kegiatan Menko ataupun Kemenko dan penting banget itu, jadi keliatan kegiatan yang setiap dilaksanakan oleh Menko Polhukam dan kegiatan program kinerja Kemenko Polhukam, gitu” (Gan Gan, Wawancara 23 November 2018).

Di era globalisasi ini dimana ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi siapapun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan posisi mereka, begitu juga halnya dengan humas Kemenko Polhukam RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung fungsi manajemen lembaganya. Humas

lembaga pemerintah sangat dibutuhkan karena perannya yang mampu menggiring opini publik yang baik terhadap lembaga, terlebih lagi saat ini banyak isu-isu tidak benar yang menyerang lembaga pemerintah tidak terkecuali Kemenko Polhukam RI, agar mampu menjalankan perannya dengan baik humas Kemenko Polhukam RI menempatkan tiga subbagian dibawahnya yaitu subbagian hubungan kementerian atau lembaga, subbagian hubungan media dan subbagian publikasi, yang saling bekerjasama dengan ketiga subbagian tersebut guna mendapatkan hasil yang baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk memberikan pelayanan informasi bagi publik, bagian humas juga melakukan kerjasama dengan para awak media lain dan para wartawan serta jurnalis dengan membangun hubungan media guna membantu menyebarkan informasi dan membantu menggiring opini publik yang baik.

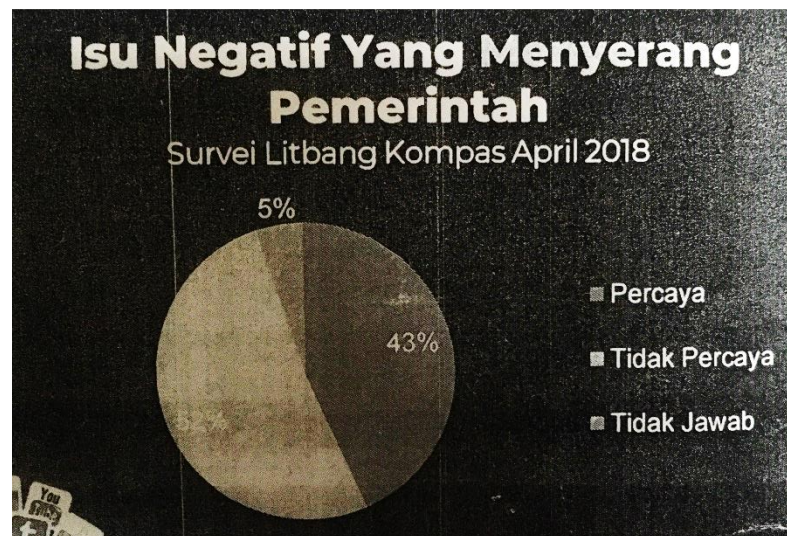
Pelayanan informasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kehumasan dalam memastikan bahwa publik dapat memperoleh informasi terkait kegiatan Menko dan Kemenko Polhukam RI, hal tersebut dilakukan agar adanya transparansi antara lembaga pemerintah dan publik, serta untuk menghindari adanya kecurigaan ataupun kesalahpahaman antara publik dan lembaga pemerintah. Humas Kemenko Polhukam RI menjalankan tugasnya dengan mengacu pada UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan terciptanya transparansi serta adanya kontrol atau pengawasan publik terhadap kerja pemerintah dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU ini mengatur empat hal pokok diantaranya yaitu : 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, 2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”¹.

¹ UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Humas lembaga pemerintah tentunya memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tugasnya begitu juga dengan humas di Kemenko Polhukam RI. Kemenko Polhukam RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam RI adalah kementerian koordinator yang paling banyak mengkoordinasi kementerian lainnya serta lembaga lain yang dianggap perlu, tentunya hal ini akan membuat Kemenko Polhukam RI mendapatkan banyak perhatian media dan publik, sehingga dalam hal ini peran dari humas akan berpengaruh bagi manajemen lembaga.

Mengingat banyaknya isu negatif yang menyerang pemerintah Indonesia dan tingginya tingkat kepercayaan publik atau masyarakat terhadap isu negatif tersebut, maka peran humas menjadi sangat penting untuk memperbaiki keadaan.



Gambar 1.1 Hasil Survei Litbang Kompas April 2018
(Sumber: Data Sosialisasi Humas Kemenko Polhukam RI,
Jakarta, 28 Mei 2018)

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Praktisi Humas Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Membangun Citra Positif Lembaga” oleh Faizah pada tahun 2016, menyatakan bahwa, humas memiliki peran penting dalam menjaga citra sebuah organisasi. Pentingnya peran humas sangat

dibutuhkan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia yang tengah menghadapi krisis organisasi sehingga banyak dilanda pemberitaan negatif. Humas menjadi pendukung dalam fungsi manajemen Kementerian Agama dan berupaya membangun citra positif lembaga.

Ada beberapa berita tidak benar yang menyerang lembaga Kemenko Polhukam RI yang beredar di media massa tepatnya di pemberitaan media *online*, beberapa diantaranya yaitu, ketika partai Hanura kubu OSO menuduh Menko Polhukam menyalahgunakan hasil Rakornas tingkat menteri.



Gambar 1.2 Pemberitaan Partai Hanura Yang Masalahkan Sikap Kemenko Polhukam RI

(Sumber: <https://www.liputan6.com>)

“Wiranto patut diduga telah menyalahgunakan hasil Rakornas Tingkat Menteri, karena telah dijadikan bahan instruksi Dewan Pembina dan Dewan Penasihat Parta Hanura kepada Ketua Umum DPP partai hanura Oesman Sapta. Padahal instruksi seperti itu seharusnya dikeluarkan oleh dan atas nama Menko Polhukam kepada Oesman Sapta, sebagai pihak yang paling berkepentingan dan bertanggung

jawab terhadap eksistensi partai Hanura sebagai peserta pemilu 2019” ungkap Petrus².

Selain itu, pemberitaan lain yang dihadapi pimpinan Kemenko Polhukam RI adalah ketika SBY mantan presiden Indonesia menyebutkan bahwa dirinya memiliki kesimpulan politik yang keliru.



Gambar 1.3 Pemberitaan tentang SBY Yang Sebut Kesimpulan Politik Wiranto Keliru

(Sumber: www.sinarharapan.co)

“Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi atas komentar Menkopolkam Wiranto soal perobekan bendera Demokrat di Riau. SBY menilai, Wiranto membeberkan kesimpulan politik yang keliru atas peristiwa perobekan tersebut”³.

Beredarnya pemberitaan tidak benar tersebut di media massa dan bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut mampu mempengaruhi opini publik terhadap Kemenko Polhukam RI yang dipimpin oleh Menko Wiranto, sehingga disini peran humas penting dalam menangani pemberitaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman

² <https://www.liputan6.com/news/read/3588726/hanura-kubu-oso-masih-masalahkan-sikap-kemenko-polhukam>, diakses pada 7/01/2019, pukul 21.19 WIB.

³ www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5292/sby_kesimpulan_politik_wiranto_keliru, diakses pada 8/01/2019, pukul 16.03 WIB.

dan pandangan-pandangan yang tidak benar dari publik kepada Menko maupun Kemenko Polhukam RI. Karena Kemenko Polhukam RI merupakan lembaga yang tidak kalah penting yang harus memiliki citra yang baik di mata publik atau masyarakat. Ditengah hangatnya isu politik saat ini, sebagai pimpinan dari kementerian yang mengkoordinasi masalah politik, hukum dan keamanan tentunya Wiranto dan praktisi humas Kemenko Polhukam RI harus mampu menjaga nama baik Menko dan lembaga Kemenko Polhukam RI yang baik dimata publik atau masyarakat.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji peran humas Kemenko Polhukam RI sebagai objek penelitian yang merupakan salah satu upaya dalam memberikan gambaran tentang peran Humas lembaga pemerintah yaitu Kemenko Polhukam RI, dan peneliti ingin mengetahui seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam menggiring opini publik yang baik terhadap Kemenko Polhukam RI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data-data yang didapat melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, dengan judul skripsi yaitu Peran Hubungan Masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas pada penelitian yang berjudul **“PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA”**, dari fokus penelitian tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian **“Bagaimana peran hubungan masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Peran Hubungan Masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai peran humas di lembaga pemerintah, serta dapat menjadi tambahan referensi pustaka bagi peneliti yang ingin meneliti tentang peran humas lembaga pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian tentang peran hubungan masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi materi atau sebagai penjelasan kepada para praktisi humas pemerintah dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, diskusi antar praktisi humas pemerintah.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama tujuh bulan yaitu dari bulan Juli 2018 hingga Januari 2019. Adapun waktu dan periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.1 WAKTU DAN PERIODE PENELITIAN

Kegiatan	Bulan						
	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	Novem ber	Desem ber	Januari
Pengumpulan data sekunder dengan mencari informasi (studi pustaka)							
Penyusunan proposal penelitian							
Pengumpulan proposal penelitian (<i>Desk evaluation</i>)							
Pengumpulan data primer dengan observasi dan wawancara							
Pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian							

(Sumber : Olahan Peneliti, 2019)